

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,  
DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN  
KEUANGAN DAERAH  
(Studi Empiris pada Daerah-Daerah Tertinggal di Indonesia dalam Strategi  
Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2021)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**RADEN MAS SAID**  
S U R A K A R T A

**Disusun Oleh:**

**AZKA BARIZATI ALMAS**  
**NIM. 16.52.2.1.201**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2022**

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN  
BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN  
DAERAH  
(Studi Empiris pada Daerah-Daerah Tertinggal di Indonesia dalam Strategi  
Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2021)

SKRIPSI

Diajukan Kepada  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
Dalam Bidang Akuntansi Syariah

Oleh:

Azka Barizati Almas  
NIM. 16.52.2.1.201

Surakarta, 27 Oktober 2022

Disetujui dan disahkan oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si.  
NIP. 19841008 201403 2 005

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : AZKA BARIZATI ALMAS  
NIM : 16.52.2.1.201  
JURUSAN : AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada Daerah-Daerah Tertinggal di Indonesia dalam Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2021)”

Benar-benar bukan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Surakarta, 27 Oktober 2022



Azka Barizati Almas

## **SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : AZKA BARIZATI ALMAS ,  
NIM : 16.52.2.1.201  
JURUSAN : AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwasanya telah melakukan penelitian dengan judul "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada Daerah-Daerah Tertinggal di Indonesia dalam Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2021)"

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Surakarta, 27 Oktober 2022



Azka Barizati Almas

Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si.  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdri : Azka Barizati Almas

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Azka Barizati Almas NIM : 16.52.21.201 yang berjudul :

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada Daerah-Daerah Tertinggal di Indonesia dalam Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2021)**

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh*

Surakarta, 27 Oktober 2022  
Dosen Pembimbing Skripsi



Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si.  
NIP. 19841008 201403 2 005

**PENGESAHAN**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,  
DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN  
KEUANGAN DAERAH  
(Studi Empiris pada Daerah-Daerah Tertinggal di Indonesia dalam Strategi  
Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2021)**

Oleh:

**AZKA BARIZATI ALMAS**  
**NIM. 16.52.2.1.201**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah  
Pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 / 8 Rabiul Akhir 1444 H dan dinyatakan  
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi


Dewan Penguji:

Penguji 1 (Merangkap Ketua Sidang)  
Fitri Laela Wijayati, S.E., M.Si.  
NIP. 19860625 201403 2 001



---

Penguji II  
Marita Kusuma Wardani, S.E., M.Si., Ak  
NIP. 19740302 200003 2 003



---

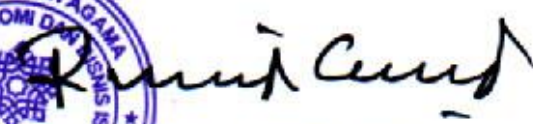
Penguji III  
Usnan, S.E.I., M.E.I.  
NIP. 19850919 201403 1 001



---

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si.  
NIP. 19720304 200112 1 004

## MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

*“Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” (HR. Ahmad. Ath-Thabrani, ad-Daruqutni)*

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah rabbil'alamiin,*

*Kupersembahkan karya sederhana ini untuk:*

*Pemerintah Daerah Tertinggal Di Indonesia Dalam Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2021 yang berusaha memberikan layanan terbaik untuk masyarakatnya dan kepada pembaca skripsi ini. Semoga dengan skripsi ini dapat menambah referensi dalam penelitian yang serupa dengan berbagai ide baru terutama dalam upaya menciptakan tingkat kemandirian keuangan daerah.*

*Semoga karya yang telah disusun dengan cinta dan harapan ini bisa menjadi amal jariyah bagi saya sebagai penyusun dan penulis, kedua orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan dengan ikhlas dan bagi semua dosen yang membuka wawasan keilmuan saya.*

*Alhamdulillah jazaakumullahu khoiron katsiiran*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaarokaatuh*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Daerah-Daerah Tertinggal di Indonesia dalam Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2021)”

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Fitri Laela Wjayati S.E., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Anim Rahmayati, M.Si., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kedua Orang tua penulis, Dr. H. Abdul Aziz Nugraha Pratama, S.Ag., MM. dan Hj. Zulaikha Ariyanti, S.Psi., atas semua doa, dukungan, perhatian dan kasih sayang kepada penulis.
7. Adik-adik penulis, Abu Ammar Tajuddin Al-Azizy, Afzalur Rahman Al-Azizy, dan Azky Huwaidati Mumtazah yang telah memberikan dukungan serta doa yang tiada henti.
8. Sahabat-sahabat penulis yang selalu mendoakan, memberi dukungan, semangat dan motivasi.
9. Teman-teman Akuntansi Syariah E angkatan 2016, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama menempuh studi di kampus tercinta ini.
10. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis berdoa semoga karya yang sederhana ini memberikan manfaat bagi semua.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaarokaatuh*

Surakarta, 27 Oktober 2022

Penulis

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of the local own revenue, capital expenditure, balancing fund of research and development level of local independence.*

*The population in this study is the regions that are part of the national strategy for accelerating the development of underdeveloped regions in 2021 with a total of 62 regions. The sampling technique used in this study was the purposive sampling method and the research samples were obtained by 60 regions. The research method is quantitative. The data analysis technique is Multiple Regression Analysis with the help of the Eviews 10 program.*

*The results showed that local own revenue, share allocation fund, capital expenditure has no effect on the level of local independence. General allocation fund has negatif effect and special allocation fund has a positive effect on the level of local independence.*

*Keywords: The Level Of Local Independence, Local Own Revenue, balancing fund, capital expenditure*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Populasi penelitian ini adalah daerah-daerah yang tergabung dalam strategi nasional percepatan pembangunan daerah-daerah tertinggal Tahun 2021 dengan jumlah 62 daerah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan diperoleh sebanyak 60 daerah. Metode penelitian adalah kuantitatif. Teknik analisis data yaitu Analisis Regresi Berganda dengan bantuan *eviews 10*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan belanja modal berpengaruh pada tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara parsial, pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dana alokasi umum berpengaruh negatif dan dana alokasi khusus berpengaruh positif.

Kata Kunci: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN .....	iv
NOTA DINAS .....	v
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRACT.....	xi
ABSTRAK .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
DAFTAR GRAFIK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	9
1.3. Batasan Masalah.....	9
1.4. Rumusan Masalah .....	10
1.5. Tujuan Penelitian .....	10
1.6. Manfaat Penelitian .....	11
1.7. Jadwal penelitian.....	12
1.8. Sistematika Penulisan Skripsi .....	12
BAB II LANDASAN TEORI .....	14

2.1. Kajian Teori .....	14
2.1.1. Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....	14
2.1.2. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah .....	15
2.1.3. Pendapatan Asli Daerah.....	17
2.1.4. Dana Perimbangan.....	17
2.1.5. Belanja Modal.....	21
2.2. Hasil Penelitian yang Relevan .....	22
2.3. Kerangka Berfikir.....	30
2.4. Perumusan Hipotesis.....	31
2.4.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah .....	32
2.4.2. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	33
2.4.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah .....	34
2.4.4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah .....	35
2.4.5. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian.....	38
3.2 Jenis penelitian .....	38
3.3 Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel.....	38
3.3.1 Populasi .....	38
3.3.2 Sampel .....	39
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel .....	39
3.4 Data dan Sumber Data .....	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6 Variabel Penelitian .....	41
3.6.1 Variabel Dependen.....	41

3.6.2	Variabel Independen.....	41
3.7	Definisi Operasional variabel.....	41
3.8	Teknik Analisis Data.....	44
3.8.1	Statistik Deskriptif .....	44
3.8.2	Uji Asumsi Klasik.....	45
3.8.3	Uji Kelayakan Model.....	46
3.8.4	Analisis Regresi Berganda.....	47
3.8.5	Uji Hipotesis .....	47
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
4.1	Gambaran Umum Penelitian .....	48
4.2	Pengujian dan Hasil Analisis Data.....	49
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	49
4.2.2	Uji Asumsi Klasik.....	52
4.2.3	Uji Kelayakan Model.....	54
4.2.4	Analisis Regresi Linier Berganda .....	57
4.2.5	Pengujian Hipotesis (Uji T) .....	58
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian .....	60
4.3.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) .....	60
4.3.2	Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD).....	62
4.3.3	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) .....	63
4.3.4	Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) .....	64
4.3.5	Pengaruh Belanja Modal (BM) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD).....	65
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
5.1	Kesimpulan .....	67
5.2	Keterbatasan Penelitian .....	68

5.3 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	70
LAMPIRAN.....	74



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rasio Kemandirian Daerah-Daerah Tertinggal Stranas PPDT 2020-2024 Tahun 2021 .....	3
Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah....	16
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	20
Tabel 3.1 Kronologi Pemilihan Sampel Penelitian .....	38
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	39
Tabel 4.1 Sampel Penelitian.....	48
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif .....	50
Tabel 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	53
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas. ....	54
Tabel 4.5 Hasil Uji F.....	55
Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi. ....	56
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Berganda.....	57
Tabel 4.8 Hasil Uji Hipotesis (Uji t). ....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	31
-----------------------------------	----

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Rasio Kemandirian Daerah Tertinggal Tahun 2021 .....	4
Grafik 5.1 Hasil Uji Normalitas .....	52

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah di Indonesia dijadikan sebagai bentuk perubahan positif dari krisis 1997-1998. Waktu itu, pemerintah daerah tidak dapat mengelola kebutuhan daerahnya secara terpisah dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan diberlakukannya sistem ekonomi terpusat yang membuat perekonomian daerah sangat bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola daerahnya sendiri, terutama dalam bidang ekonomi, karena dianggap lebih peka terhadap kebutuhan daerah. Sehingga standar kesejahteraan dapat tercapai secara merata dan cepat (Ristansi & Handoyo, 2017).

Sudah bertahun-tahun sejak diberlakukannya otonomi daerah, tetapi banyak daerah yang masih ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Hal tersebut sebagaimana termuat dalam berita Kaltim Pos (<https://kaltim.prokal.co/read/news/398484-26-tahun-otonomi-daerah-kemandirian-jadi-pr.html> tanggal 26 April 2022) yang memuat sebagai berikut:

” Pelaksanaan otonomi daerah (otda) masih memicu sejumlah persoalan. Salah satunya, masih besarnya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan finansial. Persoalan itu disampaikan Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Dewantoro dalam perayaan Hari Otonomi Daerah ke-26 di kantor Kemendagri, Jakarta, (25/4). Suhajar

menggantikan Mendagri Tito Karnavian yang mendadak menghadiri rapat di Istana Negara.”

Tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu alat dalam mengukur performa finansial pemda (Mbipi, Assih, & Sumtaky, 2020). Hal ini dapat dilihat dan diukur dari besarnya efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu ada dana yang berasal dari pihak luar daerah, seperti dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana pinjaman yang diperoleh tiap Pemerintah daerah, baik itu pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota (Abdullah, Asmawanti, & Febriansyah, 2015).

Penggunaan dana yang berasal dari pihak luar daerah yang lebih dominan dalam mendanai belanja dan kebutuhan pemerintah daerah, menunjukkan kurang siapnya daerah dalam bersaing serta dalam memberanikan diri untuk meningkatkan kemandiriannya sekaligus memaksimalkan potensi, sumber daya, dan kekayaan yang dimiliki untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Dalam beberapa tahun terakhir, daerah masih memiliki proporsi dana alokasi umum masih yang tertinggi dibandingkan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Amalia & Haryanto, 2019).

Menurut Halim (2004) Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah mempunyai pola hubungan dan rasio kemandiriannya. Apabila suatu daerah memiliki rasio kemandirian 0-25% maka tingkat kemandiriannya rendah sekali dan memiliki pola hubungan instruktif. Rasio kemandirian >25-50% tingkat

kemandiriannya rendah dan memiliki pola hubungan konsultatif. Rasio kemandirian >50-70% tingkat kemandiriannya sedang dan memiliki pola hubungan partisipatif. Rasio kemandirian >75% tingkat kemandiriannya tinggi dan memiliki pola hubungan delegatif.

Pada tahun 2021, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, meluncurkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2020-2024 (Stranas PPDT 2020-2024). Didalamnya terdapat daerah-daerah tertinggal yang menjadi target untuk dilakukan pembinaan dan pembangunan supaya terjadi pemerataan dan berkurangnya tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Saputra, 2022).

Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria: a. perekonomian masyarakat; b. sumber daya manusia; c. sarana dan prasarana; d. kemampuan kemandirian keuangan daerah; e. aksesibilitas; dan f. karakteristik daerah (Kominfo, 2020). Dari enam kriteria tersebut, kemandirian keuangan menjadi salah satu alasan penetapan daerah-daerah tertinggal.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal mulai dilaksanakan mulai dari tahun 2021. Disinilah peneliti ingin focus melakukan reuiu kemandirian keuangannya dengan memasukkan variabel-variabel independen yang dapat mempengaruhinya pada pelaksanaan tahun pertamanya, 2021 yang terdiri dari 62 daerah tertinggal.



sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Musfirati & Sugiyanto (2021), hasilnya menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Keistimewaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nindita & Rahayu (2018), hasilnya Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal mempunyai pengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Andjarwati, Budiarti, Soemadijo, Yasin (2021) dengan judul “*Analysis Of Local Own Revenue and Balancing Funds On The Financial Performance Of Districts and Cities In The Region Of East Java Province*”. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menambahkan satu lagi variabel independen, yakni variabel Belanja Modal. Selain itu, penelitian ini dilakukan karena adanya riset gap dari penelitian sebelumnya.

Peranan pendapatan asli daerah sangat menentukan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah



diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian daerah (Harjito, Surya, & Yulianto, 2020)

Penelitian yang dilakukan Andjarwati, Budiarti, Soemadijo, & Yasin (2021), Arpani dan Halmawati (2020), Amalia dan Haryanto (2019), Nindita dan Rahayu (2018), pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah dan Maria (2016) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Selain pendapatan asli daerah ada dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagai faktor lain dari tingkat kemandirian keuangan daerah. Penerimaan dana bagi hasil didasarkan pada kemampuan daerah dalam menciptakan sumber pendapatan daerah yang potensial dengan cara mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam masing-masing daerah sehingga bagian dana bagi hasil terhadap pendapatan daerah meningkat. Namun, ketergantungan dari tranfer dana bagi hasil akan menurunkan tingkat kemandirian keuangan daerah (Nurhasanah & Maria, 2017)

Penelitian yang Anikmah & Sugianto (2021), Nurhasanah & Maria (2017), menunjukkan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Verawaty, Fransisca, & Rahmawati (2017)

yang menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu bagian dari dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan dan potensi masing-masing daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Andjarwati, Budiarti, Soemadijo, & Yasin, 2021). Apabila tingkat DAU yang dimiliki suatu daerah meningkat dari tahun sebelumnya, maka Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah akan menurun (Marizka, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Riyadi (2022), Nindita & Rahayu (2018), Nurhasanah & Maria (2017), yang menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Musfirawati & Sugianto (2021), Amalia & Haryanto (2019), yang menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu bagian dari dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Andjarwati, Budiarti, Soemadijo, & Yasin, 2021). Semakin besar transfer dana alokasi khusus yang diterima dari pemerintah pusat, maka semakin kuat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan

daerahnya sehingga akan membuat tingkat kemandirian keuangan suatu daerah menurun.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah & Maria (2017) menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyadi (2022), Musfirawati & Sugianto (2021), yang menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana ke daerah dalam bentuk anggaran Belanja Modal di dalam APBD untuk peningkatan aset tetap. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk penyelenggaraan pemerintahan maupun untuk peningkatan fasilitas umum (Felix, 2012). Dengan demikian diharapkan apabila suatu daerah mampu memanfaatkan belanja modalnya dengan baik, maka akan memicu pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan pemerintah pusat.

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia & Haryanto (2019) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Darwis (2015) belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan Handayani & Erinosa (2020), (Nindita & Rahayu (2018) menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Daerah-Daerah Tertinggal Di Indonesia Dalam Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2021)”**.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka identifikasi masalah yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut.

1. Masih bergantungnya pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat.
2. Kemampuan daerah yang masih rendah dalam menggali potensi dana perimbangan sehingga dana yang diperoleh relatif kecil dan mengalami penurunan.
3. Masih terdapat perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya.

### **1.3. Batasan Masalah**

1. Penelitian ini hanya meneliti mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

2. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah-daerah tertinggal di Indonesia dalam Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2020-2024 Tahun 2021.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah?
2. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah?
3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah?
5. Apakah Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menguji secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

2. Menguji secara empiris pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
3. Menguji secara empiris pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
4. Menguji secara empiris pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
5. Menguji secara empiris pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

##### 1. Bagi Akademisi

Bagi akademisi khususnya peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melaksanakan penelitian sejenis atau penelitian di bidang yang sama.

##### 2. Bagi Pemerintah Daerah.

Bagi pemerintah daerah di Indonesia yang terjun langsung ke dunia pemerintahan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi pemerintah daerah dalam melaksanakan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2021 dalam bidang kemandirian keuangan daerah.

### **1.7. Jadwal penelitian**

*Terlampir.*

### **1.8. Sistematika Penulisan Skripsi**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal. Dalam bab ini dipaparkan pula mengenai identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan proposal penelitian.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini menguraikan tentang landasan teori, variabel yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis.

#### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis penelitian, waktu penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel penelitian, data dan sumber data yang digunakan, variabel penelitian, dan teknik analisis data.

#### BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian yang telah dianalisis dengan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil penelitian ini akan dibahas secara mendalam.

#### BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Kajian Teori**

##### **2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Dalam teori keagenan, hubungan keagenan adalah kontrak antara prinsipal dan agen yang memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan atas nama prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan juga dapat diterapkan pada sektor publik. Dalam negara demokrasi, ada hubungan keagenan antara masyarakat dan pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dan pusat (Halim & Abdullah, 2006).

Sebagai agen, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral kepada pemerintah pusat (principal) untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, sementara pemerintah daerah juga berkepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian, kemungkinan agen tidak selalu dapat menjalankan sistem pemerintahan terbaik untuk kepentingan principal mereka (Halim & Abdullah, 2006).

Penelitian ini berfokus pada tingkat kemandirian keuangan daerah yang dipengaruhi oleh variabel-variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal. Variabel-variabel tersebut sangat terkait dengan teori keagenan dimana penggunaan dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal merupakan bentuk pertanggungjawaban yang harus diemban pemerintah

daerah (agen) kepada rakyat (prinsipal) dan juga kepada pemerintah pusat. Masyarakat sebagai *The Ultimate Principal* mengharapkan legislatif dapat menghasilkan kebijakan yang dapat membawa kemakmuran bagi mereka (Abdullah & Asmara, 2008).

### **2.1.2. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Berdasarkan peraturan UU No.23 Tahun 2014, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah daerah mampu melakukan pertanggungjawaban dan pembiayaan keuangan sendiri, melakukan sendiri dalam berdasarkan prinsip desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah bisa dilihat melalui besar atau kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan tingkat pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan yang diberikan pemerintah pusat dalam bentuk pinjaman lain (Susanti, Rahayu, & Yudowati, 2016).

Menurut Halim dan Kusufi (2012), Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pemerintahan, akuntabilitas dan pembangunan, serta pelayanan kepada pihak yang membayar retribusi dan pajak, yang merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat dibutuhkan. Tujuan dari kemandirian daerah adalah untuk menentukan apakah pemerintah daerah dapat melaksanakan tugasnya secara memadai dan untuk menentukan sejauh mana ketergantungan daerah pada sumber daya keuangan yang tidak dihasilkan (Putri & Sjadili, 2013).

**Tabel 2.1**  
**Pola Hubungan dan Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

<b>No</b>	<b>Rasio Kemandirian (%)</b>	<b>Tingkat Kemandirian</b>	<b>Pola Hubungan</b>
1	0-25 %	Rendah Sekali	Instruktif
2	>25-50%	Rendah	Konsultatif
3	>50-75%	Sedang	Partisipatif
4	>75%	Tinggi	Delegatif

Sumber: Halim (2004)

Menurut Halim (2004), Pola hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pola Hubungan Instruktif, yakni peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
2. Pola Hubungan Konsultatif, yakni campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola Hubungan Partisipatif, yakni peranan pemerintah pusat sudah mulai menurun, dimana daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
4. Pola Hubungan Delegatif, dimana peran pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah dianggap benar-benar mampu dan mandiri melaksanakan urusan otonomi daerah.

### **2.1.3. Pendapatan Asli Daerah**

Halim & Kusufi (2014) mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Andjarwati, Budiarti, Soemadijo, & Yasin (2021) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Peranan pendapatan asli daerah menentukan tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian daerah (Harjito, Surya, & Yulianto, 2020).

Apabila pemerintah daerah mampu meningkatkan penerimaan serta mengeksplor pendapatan asli daerah secara optimal, maka tingkat kemandirian keuangan suatu daerah akan mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil meningkatkan kemampuannya dalam membiayai sendiri urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanannya kepada masyarakatnya sendiri (Halim & Kusufi, 2014).

### **2.1.4. Dana Perimbangan**

Arpani & Halmawati (2020) menyatakan pengertian dana perimbangan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk

mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah satu dengan yang lain (Arpani & Halmawati, 2020). Dana perimbangan terdiri dari tiga, yakni dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

### **1. Dana Bagi Hasil**

Halim (2014) mendefinisikan dana bagi hasil Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil menurut Siregar (2015) adalah hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun indikator Dana Bagi Hasil menurut Siregar (2015) yaitu:

- a) Bagi Hasil Pajak Bagi hasil pajak meliputi bagi hasil PBB pertambangan, PBB perkebunan, PBB perhutanan serta PPH pasal 25 dan PPH pasal 29 wajib pajak orang pribadi dan bagi hasil cukai tembakau.
- b) Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi hasil bukan pajak meliputi bagi hasil dari Iuran Hak Pengusahaan hutan (IHPH), Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), dana reboisasi, iuran tetap, iuran eksplorasi (Royalti), pungutan hasil perikanan, pertambangan minyak bumi, dan pertambangan gas bumi.

Dana bagi hasil penerimaannya berdasarkan pada kemampuan daerah dalam menciptakan sumber pendapatan daerah yang potensial dan merupakan salah satu modal utama pemerintah daerah untuk memperoleh dana pembangunan dan menutupi pengeluaran daerah yang tidak berasal dari pendapatan asli daerah, kecuali dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pemerintah daerah harus bisa mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam masing-masing daerahnya jika menginginkan transfer bagi hasil yang besar. Dengan begitu maka bagian dana bagi hasil terhadap pendapatan daerah akan meningkat (Nurhasanah & Maria, 2017).

## **2. Dana Alokasi Umum**

Halim (2014) mendefinisikan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana yang bersifat "*block grant*", yang artinya ketika dana tersebut diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah bebas untuk menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Peraturan Pemerintah No. 55/2005 yaitu: Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang kurangnya 26% yang kemudian disalurkan kepada provinsi sebesar 10% dan kabupaten atar kota sebesar 90% dari total DAU.

Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi (Andjarwati, Budiarti, Soemadijo, & Yasin, 2021). Dana alokasi umum diberikan setiap tahun yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah (Harjito, Surya, & Yulianto, 2020).

### **3. Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah (Nordiawan, 2006). Halim (2014) menyatakan bahwa dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana alokasi khusus juga dapat digunakan untuk mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai tingkat tertentu dan mendorong percepatan pembangunan daerah (Harjito, Surya, & Yulianto, 2020).

### **2.1.5. Belanja Modal**

Belanja modal merupakan dana yang digunakan untuk memenuhi belanja kebutuhan investasi daerah. Permendagri nomor 13 dan 53 Tahun 2006, belanja modal digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan. Belanja aset tersebut digunakan untuk kegiatan pemerintahan, seperti seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja modal dalam APBD dikategorikan sebagai bagian dari belanja langsung (Tama & Pujihastuti, 2022)

Belanja Modal menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 disebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan.

Halim & Kusufi (2014) mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun akuntansi, meliputi belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja modal gedung dan bangunan; belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; belanja aset tetap lainnya; serta belanja aset lainnya.

Realisasi belanja modal yang tinggi menandakan bahwa pencapaian sarana dan prasarana baik untuk kelancaran dalam pemerintahan maupun dalam pelayanan publik telah memadai sehingga menarik investor untuk berinvestasi



yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan dalam daerah itu sendiri.

Pendapatan yang tinggi akan meningkatkan pembiayaan dalam hal belanja modal

(Kasdy, Nadirsyah, & Fahlevi, 2018)

## 2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

Tabel 2.2

### Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Tri Andjarwati, Endah Budiarti, Pramita Studiviany Soemadijo, dan Muhammad Yasin (2021)	<i>Analysis Of Local Own Revenue and Balancing Funds On The Financial Performance Of Districts and Cities In The Region Of East Java Province</i>	Kuantitatif  Dependen: <i>Regional Financial Performance</i>  Independen: <i>Regional Original Income, Balanced Fund</i>  Populasi: Wilayah Provinsi Jawa Timur  Sampel: <i>Purposive Random Sampling</i>  Teknik Analisis Data: Regresi <i>Partial Least Square</i> (PLS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</li> <li>• Dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (rasio kemandirian) pemerintah daerah</li> </ul>
2	Wike Nurliza Arpani &	Pengaruh Pendapatan Asli	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD dan Dana Perimbangan</li> </ul>

	Halmawati (2020)	Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2010-2018)	<p>Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p>Independen: PAD, Dana Perimbangan</p> <p>Intervening: Belanja Modal</p> <p>Populasi: Kabupaten dan Kota Provinsi Riau</p> <p>Sampel: Sampel Jenuh</p> <p>Teknik Analisis Data: SEM Alat Analisis: PLS</p>	<p>berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja Modal tidak dapat memediasi PAD dan Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</li> </ul>
3	Nareswari Listya Nindita & Sri Rahayu (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Serta Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat	<p>Kuantitatif</p> <p>Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p>Independen: PAD, DAU, Belanja Modal</p> <p>Populasi: Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat</p> <p>Sampel: Sampel Jenuh</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</li> <li>• DAU tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</li> </ul>

			<p>Teknik Analisis Data: Regresi data panel</p> <p>Alat Analisis: Eviews 9.0</p>	
4	Wulan Riyadi (2022)	<p>Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat</p>	<p>Kuantitatif</p> <p>Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p>Independen: DAU, DAK, Belanja Modal</p> <p>Populasi: Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat</p> <p>Sampel: Sampel Jenuh</p> <p>Teknik Analisis Data:</p> <p>Analisis Regresi Linier Berganda dan Analisis Koefisien Determinasi</p> <p>Alat Analisis: SPSS 21</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAU tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</li> <li>• DAK dan Belanja Modal berpengaruh positif (+) dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</li> </ul>
5	Andini Marselina, Eva Herianti (2022)	<p>Determinan Kemandirian Keuangan Daerah</p>	<p>Kuantitatif</p> <p>Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap</li> </ul>

			<p>Independen: Belanja Modal, Pajak Daerah, DAU</p> <p>Populasi: Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan</p> <p>Sampel: <i>Purposive Sampling</i></p> <p>Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Data Panel</p> <p>Alat Analisis: Eviews 10</p>	<p>Kemandirian Keuangan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah</li> <li>• DAU tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah</li> </ul>
6	Annafi Indra Tama dan Isti Pujihastuti (2022)	Determinan Kemandirian Keuangan Pada Pemda Tingkat II Di Provinsi Jawa Tengah	<p>Kuantitatif</p> <p>Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p>Independen: DAK, Belanja Modal, Partisipasi Angkatan Kerja, Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Populasi: Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.</li> <li>• Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.</li> <li>• Tingkat Partisipasi</li> </ul>

			<p>Sampel: <i>Purposive Sampling</i></p> <p>Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda</p> <p>Alat Analisis: SPSS 25</p>	<p>Angkatan Kerja tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah</li> </ul>
7	Anikmah Musfirati & Hari Sugianto (2021)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	<p>Kuantitatif</p> <p>Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p>Independen: DAU, DAK, DBH, Dana Keistimewaan</p> <p>Populasi: Kabupaten dan Kota Provinsi DIY</p> <p>Sampel: Sampel Jenuh</p> <p>Teknik Analisis Data: Analisis regresi data panel dengan model Fixed Effect metode Generalized Least Square</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAU berpengaruh negatif (-) dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</li> <li>• DAK dan Dana Keistimewaan berpengaruh positif (+) dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</li> <li>• DBH tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.</li> </ul>

			Alat Analisis: Stata 16	
8	Cindi Oktavia dan Nur Handayani (2021)	Pengaruh PAD, <i>Tax Effort</i> , Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	<p>Kuantitatif</p> <p>Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p>Independen: PAD, <i>Tax Effort</i>, Belanja Modal</p> <p>Populasi: Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur</p> <p>Sampel: Sampel jenuh</p> <p>Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linier Berganda</p> <p>Alat Analisis: SPSS 25</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</li> <li>• <i>Tax Effort</i> tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</li> <li>• Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</li> </ul>
9	Tri Utari Handayani dan Erinis (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel	<p>Kuantitatif</p> <p>Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p>Independen: PAD, Belanja Modal</p> <p>Moderasi:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</li> <li>• Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian</li> </ul>

		Moderating (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2018)	<p>Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>Populasi: Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat</p> <p>Sampel: Sampel jenuh</p> <p>Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linier Berganda</p> <p>Alat Analisis: SPSS 25</p>	<p>Keuangan Daerah</p> <p>Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat memoderasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p>
10	Afifah Fauziah Amalia N & Haryanto (2019)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017	<p>Kuantitatif</p> <p>Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p>Independen: PAD, DAU, Belanja Modal</p> <p>Populasi: Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Sampel: Sampel Jenuh</p> <p>Teknik Analisis Data: Regresi linier berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD berpengaruh positif (+) dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</li> <li>• DAU berpengaruh negatif (-) dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</li> <li>• Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.</li> </ul>

			Alat Analisis: SPSS 21	
11	Nurhasanah & Maria (2017)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota Di Provinsi Bengkulu	<p>Kuantitatif</p> <p>Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p>Independen: PAD, DAU, DAK, DBH</p> <p>Populasi: Kabupaten dan Kota Provinsi Bengkulu</p> <p>Sampel: Sampel Jenuh</p> <p>Teknik Analisis Data: Analisis statistik deskriptif dan uji regresi berganda</p> <p>Alat Analisis: SPSS 20</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD, DAU, dan DBH tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</li> <li>• DAK berpengaruh negatif (-) dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</li> </ul>
12	Verawaty, Septiani Fransisca, Richa Rahmawati (2017)	Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan	<p>Kuantitatif</p> <p>Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p>Independen: PAD, DAU, DAK, DBH,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif (+) dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</li> <li>• DAU dan DBH berpengaruh</li> </ul>

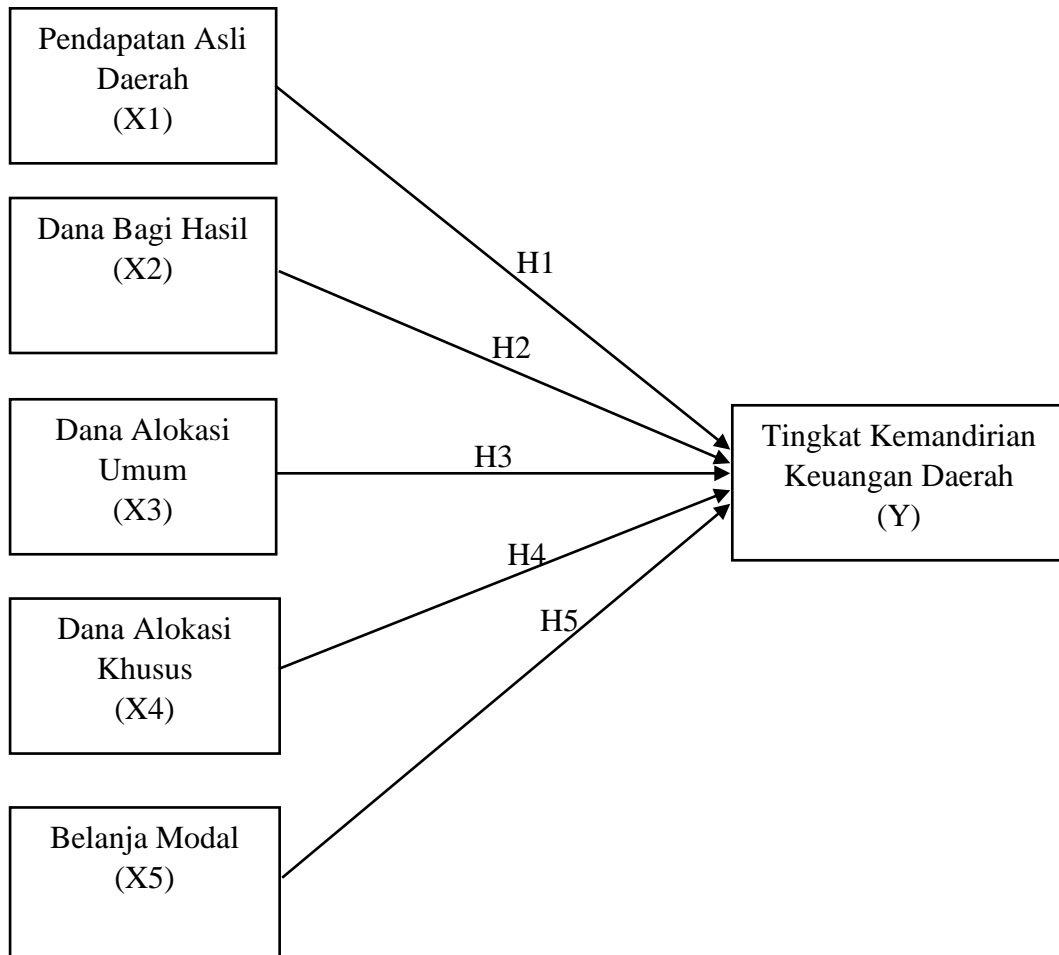


			Pendapatan Lain-lain yang sah  Populasi: Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan  Sampel: <i>Purposive sample</i>  Teknik Analisis Data:  Analisis Regresi Linier Berganda  Alat Analisis: SPSS 21	negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah  • DAK dan Pendapatan Lain-lain yang Sah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
--	--	--	--	---

### 2.3. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap masalah yang akan dibahas. Dalam penelitian ini pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal merupakan variabel yang berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Adapun kerangka berfikir yang penelitian ini digambarkan dalam diagram berikut.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



#### **2.4. Perumusan Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2017).

#### **2.4.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Hubungan antara pemerintah pusat (prinsipal) dan pemerintah daerah (agen) berjalan melalui pendelegasian terhadap pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri. Salah satu bentuk kemandirian keuangan tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan PAD kepada pemerintah pusat. Di sisi lain masyarakat juga menginginkan pemerintah daerah dapat menghasilkan kebijakan yang dapat membawa kemakmuran bagi mereka (Abdullah & Asmara, 2008)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan poin utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin besar PAD dibandingkan dengan bantuan dari pemerintah pusat, semakin tinggi pula tingkat kemandirian yang dimiliki oleh suatu daerah (Nurkhayati, 2022). Tingkat kemandirian ini ditunjukkan dengan besarnya kontribusi PAD untuk mendanai pembangunan dan belanja-belanja daerahnya (Arpani & Halmawati, 2020).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andjarwati, Budiarti, Soemadijo, & Yasin (2021), Arpani & Halmawati (2020), (Amalia & Haryanto (2019), (Nindita & Rahayu, 2018), yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan diatas hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

**H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah**

#### **2.4.2. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Dalam pemerintahan, prinsipal atau pemberi kuasa adalah pemerintah pusat dan agen atau orang yang melaksanakan tugas/wewenang adalah pemerintah daerah. Pada teori keagenan mengasumsikan bahwa agen tidak dapat dipercaya untuk bertindak demi kepentingan prinsipal mereka sebanyak mungkin. Pihak agen mengelola pemerintahan daerahnya masih dengan ketergantungan pada pemberian bantuan dana perimbangan yang menyebabkan menjadi tidak mandirinya daerah tersebut. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen menjadi dasar munculnya teori ini (Arpani & Halmawati, 2020)

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu komponen dari dana perimbangan yang bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Suatu daerah apabila menginginkan transfer bagi hasil yang tinggi maka pemerintah daerah tersebut harus dapat mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sehingga kontribusi yang diberikan DBH terhadap pendapatan daerah dapat meningkat (Nurhasanah & Maria, 2017).

Semakin besar transfer dana bagi hasil yang diterima dari pemerintah pusat, maka semakin kuat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sehingga akan membuat tingkat kemandirian keuangan suatu daerah menurun (Marizka, 2013).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Verawaty, Fransisca, & Rahmawati (2017) yang menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan diatas hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

**H2: Dana bagi hasil berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah**

### **2.4.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Dalam pemerintahan, prinsipal atau pemberi kuasa adalah pemerintah pusat dan agen atau orang yang melaksanakan tugas/wewenang adalah pemerintah daerah. Pada teori keagenan mengasumsikan bahwa agen tidak dapat dipercaya untuk bertindak demi kepentingan prinsipal mereka sebanyak mungkin. Pihak agen mengelola pemerintahan daerahnya masih dengan ketergantungan pada pemberian bantuan dana perimbangan yang menyebabkan menjadi tidak mandirinya daerah tersebut. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen menjadi dasar munculnya teori ini (Arpani & Halmawati, 2020)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu bagian dari dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan dan potensi masing-masing daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Andjarwati, Budiarti, Soemadijo, & Yasin, 2021). Apabila tingkat DAU yang

dimiliki suatu daerah meningkat dari tahun sebelumnya, maka Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah akan menurun (Marizka, 2013).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andjarwati, Budiarti, Soemadijo, & Yasin (2021), Musfirati & Sugiyanto (2021), Amalia & Haryanto (2019), yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan diatas hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

**H3: Dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah**

#### **2.4.4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Dalam pemerintahan, prinsipal atau pemberi kuasa adalah pemerintah pusat dan agen atau orang yang melaksanakan tugas/wewenang adalah pemerintah daerah. Pada teori keagenan mengasumsikan bahwa agen tidak dapat dipercaya untuk bertindak demi kepentingan prinsipal mereka sebanyak mungkin. Pihak agen mengelola pemerintahan daerahnya masih dengan ketergantungan pada pemberian bantuan dana perimbangan yang menyebabkan menjadi tidak mandirinya daerah tersebut. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen menjadi dasar munculnya teori ini (Arpani & Halmawati, 2020)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu bagian dari dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus

yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Andjarwati, Budiarti, Soemadijo, & Yasin, 2021).

Kebutuhan khusus yang dimaksud adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus atau komitmen atau prioritas nasional (Nurhasanah & Maria, 2017). Semakin besar transfer dana alokasi khusus yang diterima dari pemerintah pusat, maka semakin kuat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sehingga akan membuat tingkat kemandirian keuangan suatu daerah menurun.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andjarwati, Budiarti, Soemadijo, & Yasin (2021), Nurhasanah & Maria (2017), yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan di atas hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

**H4: Dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah**

#### **2.4.5. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Hubungan antara pemerintah pusat (prinsipal) dan pemerintah daerah (agen) berjalan melalui pendelegasian terhadap pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri. Pemerintah daerah secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan belanja modal kepada pemerintah pusat. Di sisi lain masyarakat juga menginginkan pemerintah daerah dapat

menghasilkan kebijakan yang dapat membawa kemakmuran bagi mereka (Abdullah & Asmara, 2008)

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan untuk terus meningkatkan sumber pendapatan. Hal ini diperlukan untuk mendanai kegiatan pemerintahan dalam bentuk belanja modal. Banyaknya belanja modal yang dibiayai oleh keuangan daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut dapat menjalankan pemerintahannya. Pelayanan publik yang dapat ditingkatkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal dari pendapatan daerah dibandingkan dari keuangan pemerintah pusat seperti DAU maupun DAK mengartikan bahwa pendapatan daerah sendiri telah mencukupi untuk mendanai pemerintahannya (Handayani & Erinos, 2020).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwis (2015) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan diatas hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

**H5: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian**

Waktu penelitian direncanakan mulai dari penyusunan perencanaan proposal penelitian sampai dengan selesainya penelitian ini, yakni dimulai pada bulan Mei sampai dengan November 2022. Penelitian ini dilakukan pada daerah-daerah tertinggal di Indonesia dalam Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Stranas PPDT) tahun 2021.

#### **3.2 Jenis penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian Kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017) metode kuantitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada sifat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan apa yang menjadi faktor penentu pada tingkat kemandirian keuangan daerah.

#### **3.3 Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel**

##### **3.3.1 Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi

penelitian ini adalah daerah-daerah tertinggal di dalam Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Stranas PPDT) yang dimuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2021, tahun tahun 2021 yang terdiri dari 62 kabupaten tertinggal..

### **3.3.2 Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2017). Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu pemilihan sampel dengan memberikan kriteria tertentu. Berdasarkan metode pemilihan sampel, diperoleh sampel sebanyak 60 data pengamatan.

### **3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan kriteria tertentu (Sugiyono, 2017). Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Daerah-daerah tertinggal di Indonesia dalam Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Stranas PPDT) yang dimuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2021 dengan data penelitian 2021.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia yang memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan untuk proses penelitian.

**Tabel 3.1**  
**Kronologi Pemilihan Sampel Penelitian**

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Daerah-daerah tertinggal di Indonesia dalam yang tercantum dalam Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Stranas PPTD)	62
2.	Daerah yang tidak memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan untuk proses penelitian tahun 2021	(2)
Sampel Penelitian		60

### **3.4 Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2017). Sumber data sekunder penelitian ini adalah data keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari tahun 2021. Data keuangan tersebut diperoleh antara lain dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Republik Indonesia.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi, yakni melakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari website <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> dan sumber lainnya.

### 3.6 Variabel Penelitian

#### 3.6.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen sering disebut juga variabel terikat (Sugiyono, 2017). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemandirian keuangan daerah.

#### 3.6.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen sering disebut juga variabel bebas (Sugiyono, 2017). Variabel Independen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal

### 3.7 Definisi Operasional variabel

**Tabel 3.2**  
**Definisi Operasional Variabel**

No	Nama Variabel	Definisi	Indikator Pengukuran
1	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ (Nurhasanah & Maria, 2017)

		<p>membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.</p> <p>(Halim &amp; Kusufi, 2014)</p>	
2	Pendapatan Asli Daerah	<p>Penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.</p> <p>(Mardiasmo, 2009)</p>	$\frac{\textit{Realisasi Penerimaan PAD}}{\textit{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$ <p>(Nurhasanah &amp; Maria, 2017)</p>
3	Dana Bagi Hasil	<p>Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka</p>	$\frac{\textit{Realisasi DBH}}{\textit{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ <p>(Nurhasanah &amp; Maria, 2017)</p>

		<p>pelaksanaan desentralisasi. DBH ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah</p> <p>(Nurhasanah &amp; Maria, 2017)</p>	
4	Dana Alokasi Umum	<p>Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.</p> <p>(Halim &amp; Kusufi, 2014)</p>	$\frac{\textit{Realisasi DAU}}{\textit{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ <p>(Nurhasanah &amp; Maria, 2017)</p>
5	Dana Alokasi Khusus	<p>Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu</p> <p>(Halim, 2014)</p>	$\frac{\textit{Realisasi DAK}}{\textit{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ <p>(Nurhasanah &amp; Maria, 2017)</p>

6	Belanja Modal	Pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun akuntansi.  (Halim & Kusufi, 2014)	$\frac{\textit{Belanja Modal}}{\textit{Belanja Daerah}} \times 100\%$ (Suwandi & Tahar, 2015)
---	---------------	--	---

### 3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program Eviews 10. Terdapat beberapa tahap dalam menganalisis data ini.

#### 3.8.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2013). Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan gambaran tentang nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum dari variabel-variabel pengamatan, yakni terdiri dari Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal (BM).

### 3.8.2 Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Penelitian ini menggunakan uji *Jarque Bera* (JB). Data dianggap normal apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  maka regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali & Ratmono, 2017).

#### 2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

Cara untuk mengetahui ada tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji *Glejser*. Dalam uji *Glejser*, adanya indikasi terjadi heteroskedastisitas apabila variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Jika nilai *prob.*  $< 0.05$  maka terindikasi adanya masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

#### 3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi



yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Hasil uji multikolinieritas dapat diketahui dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika  $VIF < 10$  maka dapat dikatakan bahwa model regresi tidak terdapat gangguan multikolinieritas (Ghozali, 2013).

### 3.8.3 Uji Kelayakan Model

#### 1. Uji F

Uji F atau biasa disebut dengan uji signifikansi secara keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi maupun diestimasi, apakah Y berhubungan linier terhadap X1, X2, X3, X4, dan X5. Uji F ini menguji joint hipotesis bahwa  $b_1, b_2, b_3, b_4,$  dan  $b_5$  secara simultan sama dengan nol (Ghozali, 2013).

Kriteria pengujian yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai signifikan yang diperoleh dengan taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05. Apabila nilai signifikan  $< 0,05$  maka variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau hipotesis di dukung (Ghozali, 2013).

#### 2. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R Square* karena variabel independen lebih dari dua dan nilai *Adjusted R Square* dapat naik turun apabila variabel independen ditambahkan dalam model penelitian. Nilai besarnya *Adjusted R Square* dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Semakin besar nilai

*Adjusted R Square* maka pengaruh variasi dari variabel dependen terhadap variabel independen semakin besar (Ghozali, 2016).

### 3.8.4 Analisis Regresi Berganda

Model penelitian dalam penelitian ini adalah:

$$\beta\text{TKKD} = \alpha + \beta_1\text{PAD} + \beta_2\text{DBH} + \beta_3\text{DAU} + \beta_4\text{DAK} + \beta_5\text{BM} + e$$

Keterangan :

TKKD : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1\text{PAD}$  : Pendapatan Asli Daerah

$\beta_2\text{DBH}$  : Dana Bagi Hasil

$\beta_3\text{DAK}$  : Dana Alokasi Khusus

$\beta_4\text{DAU}$  : Dana Alokasi Umum

$\beta_5\text{BM}$  : Belanja Modal

e : Koefisien error

### 3.8.5 Uji Hipotesis

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2013). Kriteria pengujian yang digunakan dengan membandingkan nilai signifikan yang diperoleh dengan taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05. Apabila nilai signifikan  $< 0,05$  maka variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau hipotesis di dukung.

## BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Penelitian

Sampel di penelitian ini adalah Daerah-daerah tertinggal di Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020, tahun tahun 2019-2021 yang melaporkan laporan APBD selama tahun 2019-2021 di DJPK KemenKeu. Teknik pengambilan sampel di penelitian ini memakai pendekatan *purposive sampling* sehingga didapati sampel sebanyak 60 daerah. Berikut adalah daftar daerah yang menjadi sampel penelitian.

**Tabel 4.1**  
**Sampel Penelitian**

No	Pemerintah Daerah	No	Pemerintah Daerah
1	Kabupaten Teluk Wondama	31	Kabupaten Seram Bagian Barat
2	Kabupaten Teluk Bintuni	32	Kabupaten Seram Bagian Timur
3	Kabupaten Sorong Selatan	33	Kabupaten Maluku Barat Daya
4	Kabupaten Sorong	34	Kabupaten Buru Selatan
5	Kabupaten Tambrau	35	Kabupaten Kepulauan Sula
6	Kabupaten Maybrat	36	Kabupaten Pulau Taliabu
7	Kabupaten Manokwari Selatan	37	Kabupaten Lombok Utara
8	Kabupaten Pegunungan Arfak	38	Kabupaten Sumba Barat
9	Kabupaten Jayawijaya	49	Kabupaten Sumba Timur
10	Kabupaten Nabire	44	Kabupaten Kupang
11	Kabupaten Paniai	41	Kabupaten Timor Tengah Selatan
12	Kabupaten Puncak Jaya	42	Kabupaten Belu

13	Kabupaten Boven Digoel	43	Kabupaten Alor
14	Kabupaten Mappi	44	Kabupaten Lembata
15	Kabupaten Asmat	45	Kabupaten Rote Ndao
16	Kabupaten Yahukimo	46	Kabupaten Sumba Tengah
17	Kabupaten Pegunungan Bintang	47	Kabupaten Sumba Barat Daya
18	Kabupaten Keerom	48	Kabupaten Manggarai Timur
19	Kabupaten Waropen	49	Kabupaten Sabu Raijua
20	Kabupaten Supiori	50	Kabupaten Malaka
21	Kabupaten Mamberamo Raya	51	Kabupaten Donggala
22	Kabupaten Nduga	52	Kabupaten Tojo Una-una
23	Kabupaten Lanny Jaya	53	Kabupaten Sigi
24	Kabupaten Mamberamo Tengah	54	Kabupaten Nias
25	Kabupaten Yalimo	55	Kabupaten Nias Selatan
26	Kabupaten Puncak	56	Kabupaten Nias Utara
27	Kabupaten Dogiyai	57	Kabupaten Nias Barat
28	Kabupaten Intan Jaya	58	Kabupaten Kepulauan Mentawai
29	Kabupaten Deiyai	59	Kabupaten Musi Rawas Utara
30	Kabupaten Kepulauan Aru	60	Kabupaten Pesisir Barat

*Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020*

Penelitian ini terdiri dari dua variabel penelitian yaitu variabel tingkat kemandirian keuangan daerah sebagai variabel dependen, variabel Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan belanja modal.

## **4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data**

### **4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan variabel yang akan diteliti dari data sampel penelitian ini. Berikut ini tabel yang disediakan dari hasil statistik deskriptif.

**Tabel 4.2**  
**Statistik Deskriptif**

	Y_TKKD	X1_PAD	X2_DBH	X3_DAU	X4_DAK	X5_BM
Mean	0.036275	1.072318	0.028198	0.556542	0.173282	0.171965
Median	0.03025	0.8861	0.02315	0.54715	0.1806	0.16245
Maximum	0.1267	4.6343	0.1461	0.8592	0.305	0.3554
Minimum	0.005	0.1609	0.0063	0.2787	0.0697	0.0791
Std. Dev.	0.027146	0.845084	0.026277	0.088604	0.053923	0.056831
Skewness	1.274662	2.359262	2.798806	0.319896	0.079216	0.860329
Kurtosis	4.638681	9.429286	11.57035	5.146267	2.471124	3.788767
Jarque-Bera	22.96083	159.0004	261.9606	12.53949	0.762026	8.957052
Probability	0.00001	0	0	0.001893	0.683169	0.01135
Sum	2.1765	64.3391	1.6919	33.3925	10.3969	10.3179
Sum Sq. Dev.	0.043478	42.13586	0.040739	0.463185	0.171551	0.190559
Observations	60	60	60	60	60	60

*Sumber: Output Eviews, data diolah, 2022*

Tabel diatas memperlihatkan jumlah data yang dipakai dalam penelitian ini yakni 60 objek penelitian dan berikut mengenai penjelasannya:

1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD)

Hasil statistik deskriptif memperlihatkan variabel TKKD (Y) memiliki rata-rata (mean) 0.036275 dengan standar deviasi sebesar 0.027146. Nilai maximum 0.1267 milik Kabupaten Nias dan nilai minimum yakni 0.005 milik Kabupaten Mamberamo Raya.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil statistik deskriptif memperlihatkan variabel PAD (X1) memiliki rata-rata (mean) 1.072318 dengan standar deviasi sebesar 0.845084. Nilai

maximum 4.6343 milik Kabupaten Pulau Taliabu dan nilai minimum yakni 0.1609 milik Kabupaten Kepulauan Aru.

3. Dana Bagi Hasil (DBH)

Hasil statistik deskriptif memperlihatkan variabel DBH (X2) memiliki rata-rata (mean) 0.028198 dengan standar deviasi sebesar 0.026277. Nilai maximum 0.1461 milik Kabupaten Teluk Bintuni dan nilai minimum yakni 0.2787 milik Kabupaten Timor Tengah Selatan.

4. Dana Alokasi Umum (DAU)

Hasil statistik deskriptif memperlihatkan variabel DAU (X3) memiliki rata-rata (mean) 0.556542 dengan standar deviasi sebesar 0.088604. Nilai maximum 0.8592 milik Kabupaten Kepulauan Aru dan nilai minimum yakni 0.278700 milik Kabupaten Teluk Bintuni.

5. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Hasil statistik deskriptif memperlihatkan variabel DAK (X4) memiliki rata-rata (mean) 0.173282 dengan standar deviasi sebesar 1.464709. Nilai maximum 0.305 milik Kabupaten Donggala dan nilai minimum yakni 0.053923 milik Kabupaten Teluk Bintuni.

6. Belanja Modal (BM)

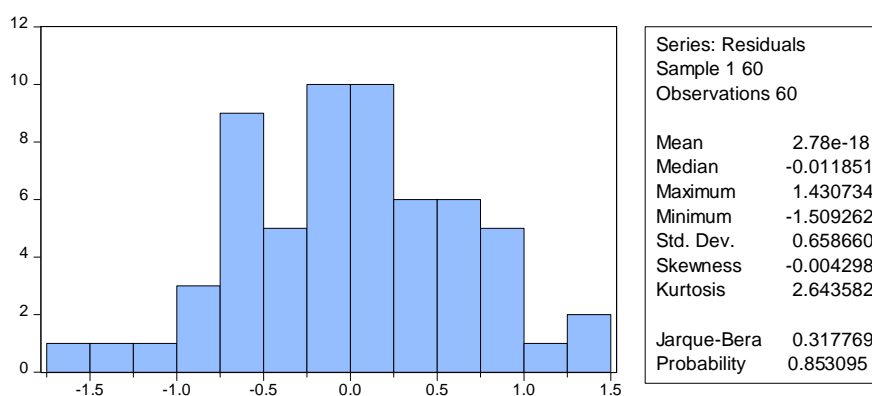
Hasil statistik deskriptif memperlihatkan variabel BM (X5) memiliki rata-rata (mean) 0.171965 dengan standar deviasi sebesar 0.056831. Nilai maximum 0.3554 milik Kabupaten Pulau Taliabu dan nilai minimum yakni 0.0791 milik Kabupaten Puncak.

## 4.2.2 Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

Untuk mengetahui data yang dipakai itu berdistribusi normal atau tidak maka perlu dilakukan uji Jarque Bera (JB). Penarikan kesimpulan berdasar pada hasil uji apabila nilai *prob.JB* lebih besar dari  $\alpha$  5% ( $\text{prob.JB} > 0.05$ ), maka dapat diketahui bahwa data berdistribusi normal. Dan sebaliknya apabila nilai *prob.y* JB lebih kecil dari  $\alpha$  5% ( $\text{prob. J-B} < 0.05$ ), maka data dapat dikatakan tidak normal (Ghozali & Ratmono, 2017).

**Grafik 4.1**  
**Grafik Uji Normalitas**



Sumber: output eviews, data diolah, 2022

Berdasar pada diagram histogram diatas, nilai dari JB sebesar 0.317769 dengan *probability* 0.853095. Dengan ini mengindikasikan bahwa hasil  $0.853095 > 0.05$  sehingga data dapat dikatakan berdistribusi normal.

### 2. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui apakah terdapat gejala heteroskedastisitas dilakukan

pengujian dengan Uji Glejser. Apabila hasil uji ini menunjukkan nilai *prob.* < 0.05 maka terindikasi adanya masalah heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas 2 persamaan dengan Uji Glejser disajikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	1.215213	Prob. F(5,54)	0.3146
Obs*R-squared	6.068372	Prob. Chi-Square(5)	0.2996
Scaled explained SS	5.081313	Prob. Chi-Square(5)	0.4060

Test Equation:  
Dependent Variable: ARESID  
Method: Least Squares  
Date: 10/27/22 Time: 01:40  
Sample: 1 60  
Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.397558	0.422984	3.304044	0.0017
X1_PAD	-0.047525	0.062440	-0.761128	0.4499
X2_DBH	-1.283357	2.360464	-0.543689	0.5889
X3_DAU	-0.771119	0.590171	-1.306603	0.1969
X4_DAK	-1.981223	1.091607	-1.814959	0.0751
X5_BM	-0.038075	1.076420	-0.035372	0.9719
R-squared	0.101140	Mean dependent var		0.531390
Adjusted R-squared	0.017912	S.D. dependent var		0.382977
S.E. of regression	0.379531	Akaike info criterion		0.994880
Sum squared resid	7.778377	Schwarz criterion		1.204315
Log likelihood	-23.84641	Hannan-Quinn criter.		1.076802
F-statistic	1.215213	Durbin-Watson stat		2.411590
Prob(F-statistic)	0.314605			

Sumber: output evIEWS, data diolah, 2022

Berdasar data yang tersaji pada tabel 4.5 diatas, hasil menunjukkan nilai *prob.* bernilai > 0.05, maka dengan demikian bisa dikatakan data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.



### 3. Uji Multikolinieritas

Agar kita tahu apakah ada masalah multikolinieritas atau tidak, maka dapat kita lihat dari nilai *variance inflation factors* (VIF). Apabila nilai *variance inflation factors*  $VIF < 10$  maka dapat dikatakan bebas multikolinieritas, dan sebaliknya ketika bernilai  $VIF > 10$  model regresi dapat ditaksir ada masalah multikolinieritas (Ghozali & Ratmono, 2017)

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Variance Inflation Factors  
Date: 10/23/22 Time: 17:04  
Sample: 1 61  
Included observations: 60

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.588753	74.52532	NA
X1_PAD	0.012830	3.007857	1.140476
X2_DBH	18.33495	3.421276	1.575846
X3_DAU	1.146149	46.05732	1.119992
X4_DAK	3.921191	16.32286	1.419159
Z_BM	3.812842	15.80534	1.532845

Sumber: output evIEWS, data diolah, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.6 telah terlihat bahwa tidak terdapat *output centered VIF* yang nilainya  $> 10$  sehingga dapat dikatakan tidak ada masalah multikolinieritas.

#### 4.2.3 Uji Kelayakan Model

##### 1. Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui layak atau tidaknya model persamaan

dalam penelitian ini. Uji F juga bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen secara simultan. Signifikan yang diperoleh dengan taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0.05. Apabila nilai signifikan  $< 0.05$  maka variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara simultan.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Statistik F**

Dependent Variable: LOG(Y\_TKKD)  
Method: Least Squares  
Date: 10/27/22 Time: 01:47  
Sample: 1 60  
Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.439459	0.767302	-4.482534	0.0000
X1_PAD	0.033410	0.113268	0.294964	0.7692
X2_DBH	2.488138	4.281934	0.581078	0.5636
X3_DAU	-2.782700	1.070583	-2.599237	0.0120
X4_DAK	9.469799	1.980200	4.782244	0.0000
X5_BM	-2.173648	1.952650	-1.113179	0.2706
R-squared	0.372054	Mean dependent var	-3.615009	
Adjusted R-squared	0.313911	S.D. dependent var	0.831189	
S.E. of regression	0.688478	Akaike info criterion	2.185973	
Sum squared resid	25.59612	Schwarz criterion	2.395408	
Log likelihood	-59.57920	Hannan-Quinn criter.	2.267895	
F-statistic	6.398937	Durbin-Watson stat	1.818901	
Prob(F-statistic)	<b>0.000098</b>			

*Sumber: output eviews, data diolah, 2022*

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai prob. F statistik sebesar 0.000098 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 maka  $H_0$  ditolak, atau yang berarti bahwa variabel PAD, DBH, DAU, DAK dan BM secara bersama-sama mempengaruhi variabel TKKD.

## 2. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R Square* karena variabel independen lebih dari dua dan nilai *Adjusted R Square* dapat naik turun apabila variabel independen ditambahkan dalam model penelitian untuk melihat apakah garis regresi mampu menjelaskan data aktualnya atau kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ) (Ghozali, 2016).

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Dependent Variable: LOG(Y\_TKKD)  
Method: Least Squares  
Date: 10/27/22 Time: 01:47  
Sample: 1 60  
Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.439459	0.767302	-4.482534	0.0000
X1_PAD	0.033410	0.113268	0.294964	0.7692
X2_DBH	2.488138	4.281934	0.581078	0.5636
X3_DAU	-2.782700	1.070583	-2.599237	0.0120
X4_DAK	9.469799	1.980200	4.782244	0.0000
X5_BM	-2.173648	1.952650	-1.113179	0.2706
R-squared	0.372054	Mean dependent var	-3.615009	
Adjusted R-squared	<b>0.313911</b>	S.D. dependent var	0.831189	
S.E. of regression	0.688478	Akaike info criterion	2.185973	
Sum squared resid	25.59612	Schwarz criterion	2.395408	
Log likelihood	-59.57920	Hannan-Quinn criter.	2.267895	
F-statistic	6.398937	Durbin-Watson stat	1.818901	
Prob(F-statistic)	0.000098			

Sumber: Output Eviews, data diolah, 2022

Hasil uji pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R-Squared

nya 0.313911. Hal ini berarti variabel bebas yaitu PAD, DBH, DAU, DAK, dan BM mampu menjelaskan variabel TKKD sebesar 31.4%. Sedangkan, sisanya sebesar 68.6% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

#### 4.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, hasil rumus regresi adalah:

$$\beta\text{TKKD} = \alpha + \beta_1\text{PAD} + \beta_2\text{DBH} + \beta_3\text{DAU} + \beta_4\text{DAK} + \beta_5\text{BM} + e$$

Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.7**  
**Uji Regresi Linier Berganda**

Dependent Variable: LOG(Y\_TKKD)  
Method: Least Squares  
Date: 10/27/22 Time: 01:47  
Sample: 1 60  
Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.439459	0.767302	-4.482534	0.0000
X1_PAD	0.033410	0.113268	0.294964	0.7692
X2_DBH	2.488138	4.281934	0.581078	0.5636
X3_DAU	-2.782700	1.070583	-2.599237	0.0120
X4_DAK	9.469799	1.980200	4.782244	0.0000
X5_BM	-2.173648	1.952650	-1.113179	0.2706
R-squared	0.372054	Mean dependent var	-3.615009	
Adjusted R-squared	0.313911	S.D. dependent var	0.831189	
S.E. of regression	0.688478	Akaike info criterion	2.185973	
Sum squared resid	25.59612	Schwarz criterion	2.395408	
Log likelihood	-59.57920	Hannan-Quinn criter.	2.267895	
F-statistic	6.398937	Durbin-Watson stat	1.818901	
Prob(F-statistic)	0.000098			

Sumber: Output Eviews, data diolah, 2022

$$\beta\text{TKKD} = -3.439459 + 0.033410 \text{ PAD} + 2.488138 \text{ DBH} - 2.782700 \text{ DAU} +$$

9.469799 DAK - 2.173648 BM

#### 4.2.5 Pengujian Hipotesis (Uji T)

Untuk menunjukkan adanya dampak antara variabel bebas kepada variabel terikat secara individual yakni perlu adanya Uji T ini. Penentuan kesimpulan dari uji t ini yakni dilihat dari nilai probabilitas apabila nilai  $< 0.05$ , maka variabel X ini memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel Y.

**Tabel 4.8**  
**Uji Regresi**

Dependent Variable: LOG(Y\_TKKD)  
Method: Least Squares  
Date: 10/27/22 Time: 01:47  
Sample: 1 60  
Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.439459	0.767302	-4.482534	0.0000
X1_PAD	0.033410	0.113268	0.294964	0.7692
X2_DBH	2.488138	4.281934	0.581078	0.5636
X3_DAU	-2.782700	1.070583	-2.599237	0.0120
X4_DAK	9.469799	1.980200	4.782244	0.0000
X5_BM	-2.173648	1.952650	-1.113179	0.2706
R-squared	0.372054	Mean dependent var	-3.615009	
Adjusted R-squared	0.313911	S.D. dependent var	0.831189	
S.E. of regression	0.688478	Akaike info criterion	2.185973	
Sum squared resid	25.59612	Schwarz criterion	2.395408	
Log likelihood	-59.57920	Hannan-Quinn criter.	2.267895	
F-statistic	6.398937	Durbin-Watson stat	1.818901	
Prob(F-statistic)	0.000098			

*Sumber: Output Eviews, data diolah, 2022*

Untuk menunjukkan adanya dampak antara variabel bebas kepada variabel terikat secara individual yakni perlu adanya Uji T ini. Penentuan kesimpulan dari uji t ini yakni dilihat dari nilai probabilitas apabila nilai  $< 0.05$ ,

maka variabel X ini memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel Y. Berdasar pada hasil uji regresi tabel 4.10 maka dapat diinterpretasikan sebagaimana hal dibawah:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD)

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui hasil bahwa besarnya koefisien PAD bernilai 0.033410 dengan nilai *probability* 0.7692. Dengan demikian *probability* menunjukkan hasil  $> 0.05$  ( $\alpha$ ) dan koefisiennya bernilai positif, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel PAD tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

2. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD)

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui hasil bahwa besarnya koefisien DBH bernilai 2.488138 dengan nilai *probability* 0.5636. Dengan demikian *probability* menunjukkan hasil  $> 0.05$  ( $\alpha$ ) dan koefisiennya bernilai positif, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel DBH tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD)

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui hasil bahwa besarnya koefisien DAU bernilai -2.782700 dengan nilai *probability* 0.0120. Dengan demikian

*probability* menunjukkan hasil  $< 0.05$  ( $\alpha$ ) dan koefisiennya bernilai negatif, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

#### 4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD)

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa besarnya koefisien DAK bernilai 9.469799 dengan nilai *probability* 0.0000. Dengan demikian *probability* menunjukkan hasil  $< 0.05$  ( $\alpha$ ) dan koefisiennya bernilai positif, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

#### 5. Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD)

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui hasil bahwa besarnya koefisien belanja modal bernilai -2.173648 dengan nilai *probability* 0.2706. Dengan demikian *probability* menunjukkan hasil  $> 0.05$  ( $\alpha$ ) dan koefisiennya bernilai negatif, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

### **4.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **4.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD)**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa PAD

tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas  $0.7692 > 0.05$  dan  $\beta$  sebesar 0.033410, sehingga tidak dapat membuktikan hipotesis penelitian yang mana terdapat pengaruh PAD terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Hasil penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 2. Pemda yang mempunyai nilai PAD tertinggi, yakni Kabupaten Pulau Taliabu sebesar 46.34% mempunyai nilai TKKD yang sangat rendah, yakni 2.65%. Meskipun memiliki PAD tertinggi diantara 60 daerah yang lain dan nilainya pun cukup tinggi, namun tingkat kemandirian keuangan daerahnya masih jauh dibawah 25%, yakni memiliki ketergantungan yang masih sangat tinggi dengan pemerintah pusat. Sehingga nilai PAD yang ada belum mampu berkontribusi untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah pada daerah-daerah tertinggal tahun 2021.

Tidak berpengaruhnya PAD berarti semakin ditingkatkan PAD tidak selalu meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah. PAD yang merupakan sumber pembiayaan yang benar-benar digali dari daerah itu sendiri mencerminkan kondisi riil daerah. Jika struktur PAD sudah kuat, dapat dinyatakan daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang kuat juga (Nurhasanah & Maria, 2017). Namun, tidak berpengaruhnya PAD terhadap TKKD dapat mencerminkan masih lemahnya struktur PAD yang ada pada daerah tertinggal tahun 2021. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nurhasanah & Maria (2017) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh



terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

#### **4.3.2 Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD)**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas  $0.5636 > 0.05$  dan  $\beta$  sebesar 2.488138, sehingga tidak dapat membuktikan hipotesis penelitian yang mana terdapat pengaruh negatif DBH terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat DBH tidak berarti bisa meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Nilai positif hasil penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 2. Pemda yang mempunyai nilai TKKD tertinggi mempunyai nilai DBH yang lebih besar juga, yakni Kabupaten Nias sebesar 12.67% mempunyai DBH 1.32%, Kabupaten Sumba Timur sebesar 11.37% mempunyai DBH 0.98%, dan Kabupaten Lombok Utara sebesar 10.24% mempunyai PAD 0.42%. Ketiga daerah yang mempunyai TKKD tertinggi tersebut juga mempunyai DBH yang lebih tinggi dibanding yang lain. Namun nilai dari DBH tersebut belum mampu mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah.

Jika pemerintah daerah menginginkan transfer bagi hasil yang tinggi maka pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Marizka, 2013). Namun, penerimaan dari sumber daya alam setiap daerah tertinggal tidak sama, sehingga

masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Selain itu, peranan pajak dalam penerimaan pendapatan daerah masih sangat rendah karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis dan kemampuan masyarakat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Musfirati & Sugiyanto (2021) dan Nurhasanah & Maria (2017) yang menyatakan bahwa DBH tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

#### **4.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD)**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa DAU berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas  $0.0120 < 0.05$  dan  $\beta$  sebesar  $-2.782700$ , sehingga dapat membuktikan hipotesis penelitian yang mana terdapat pengaruh DAU terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Hasil penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 2. Pemda yang memiliki DAU tertinggi, yakni Kabupaten Kepulauan Aru. Daerah tersebut memiliki DAU yang sangat tinggi, yakni 85.92% dan memiliki TKKD yang sangat rendah sebesar 2.80%. Sedangkan pemda yang memiliki TKKD tertinggi sebesar 12.67%, yakni Kabupaten Nias justru memiliki DAU yang lebih rendah sebesar 47.68%.

Hal ini berarti bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada daerah-daerah tertinggal tahun 2021.

Artinya, semakin naik DAU justru tingkat kemandirian keuangan daerahnya turun. Sebaliknya, semakin menurun DAU justru tingkat kemandirian keuangan daerah akan meningkat. Nilai DAU yang tinggi dibanding dengan pendapatan daerah yang lain menyebabkan tingkat kemandirian daerah-daerah tertinggal masih sangat rendah dan ketergantungan terhadap DAU yang masih tinggi (Marizka, 2013). Hasil penelitian ini mendukung penelitian Musfirati & Sugiyanto (2021), Amalia & Haryanto (2019), dan Putri (2015) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

#### **4.3.4 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD)**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa DAK berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas  $0.0000 < 0.05$  dan  $\beta$  sebesar 9.469799, sehingga tidak dapat membuktikan hipotesis penelitian yang mana DAK berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Jika dilihat dari lampiran 2, daerah tertinggal yang mempunyai tingkat kemandirian keuangan yang tertinggi, mempunyai nilai DAK yang tinggi pula. Pada Kabupaten Nias memiliki tingkat kemandirian sebesar 12.67% dan DAK sebesar 0.1523, Kabupaten Sumba Timur memiliki tingkat kemandirian sebesar 11.37% mempunyai DAK sebesar 0.1282, dan Kabupaten Belu memiliki tingkat

kemandirian sebesar 8.45% mempunyai nilai DAK sebesar 0.1128.

Bertolak belakang dengan hipotesisnya, pengaruh positif dari DAK dikarenakan Pemerintah daerah-daerah tertinggal mampu memaksimalkan penggunaan DAK untuk mendanai kebutuhan fisik maupun non fisik yang produktif. Pelaksanaannya diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan atau perbaikan sarana fisik masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang. Sehingga DAK mampu menjadi efisiensi dalam mengoptimalkan peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah (Musfirati & Sugiyanto, 2021). Hasil penelitian ini mendukung penelitian Riyadi (2022) dan Musfirati & Sugiyanto (2021) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

#### **4.3.5 Pengaruh Belanja Modal (BM) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD)**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal (BM) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas  $0.2706 > 0.05$  dan  $\beta$  sebesar  $-2,173648$ , sehingga tidak dapat membuktikan hipotesis penelitian yang mana terdapat pengaruh belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Artinya, semakin belanja modal ditingkatkan maka tidak meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Hasil penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 2. Pemda yang mempunyai nilai belanja modal tertinggi, yakni Kabupaten Pulau Taliabu

sebesar 35.54% mempunyai nilai TKKD yang sangat rendah, yakni 2.65%. Meskipun memiliki belanja modal tertinggi diantara 60 daerah yang lain tingkat kemandirian keuangan daerahnya masih jauh dibawah 25%, yakni memiliki ketergantungan yang masih sangat tinggi dengan pemerintah pusat. Sehingga nilai belanja modal yang ada belum mampu berkontribusi untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah pada daerah-daerah tertinggal tahun 2021.

Pengeluaran belanja modal hendaknya dialokasikan untuk sarana dan prasarana yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Namun, dilihat dari hasil penelitian yang ada, pengeluaran belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah tertinggal tahun 2021 belum dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga mencapai tujuan kepentingan publik serta penggunaanya belum menghasilkan output yang berdaya guna (Marizka, 2013). Hal ini menyebabkan belanja modal tidak dapat berkontribusi untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Handayani & Erinos (2020) dan Amalia & Haryanto (2019) yang menyimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian yang telah dilakukan bertujuan untuk mengetahui hasil penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, dengan kesimpulan yang dapat diambil yakni sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
3. Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
4. Dana Alokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
5. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Pada suatu penelitian yang dilakukan pasti tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian serta penyusunan hasil penelitian. Adapun keterbatasan-keterbatasan pada penelitian ini yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten dan Kota yang dijadikan penelitian hanya sebatas tahun 2021.
2. Variabel yang diteliti hanya pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal.

## **5.3 Saran**

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya bisa menambahkan objek penelitian yang luas dengan menambahkan tahun pengamatan yang lebih lama. Bagi peneliti selanjutnya juga dapat memperluas analisis terkait tingkat kemandirian keuangan daerah dengan memperbarui atau menggunakan variabel yang lain.

## 2. Bagi Praktisi

Pemerintah daerah pada daerah tertinggal sebaiknya dapat lebih menggali potensi yang dimiliki oleh setiap daerah untuk mengatasi masalah tingkat kemandirian keuangan daerah dengan memperhatikan variabel-variabel yang dapat mempengaruhinya. Selain itu juga pemerintah pusat juga turut hadir mendampingi dan memberi motivasi agar pemerintah daerah dapat bekerja secara maksimal dalam menangani masalah kemandirian keuangan daerah tertinggal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., Asmawanti, D., & Febriansyah. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 41-67.
- Abdullah, S., & Asmara, J. A. (2006). Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris Atas Aplikasi Agency Theory Di Sektor Publik. *Simposium Nasional Akuntansi IX* (hal. 1-26). Padang: DOI:10.2139/ssrn.1709142.
- Amalia, A. F., & Haryanto. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(2), 1-13.
- Andjarwati, T., Budiarti, E., Soemadijo, P. S., & Yasin, M. (2021). Analysis Of Local Own Revenue and Balancing Funds On The Financial Performance Of Districts and Cities In The Region Of East Java Province. *International Journal Of Economics and Finance Studies*, 13(1), 235-250.
- Arpani, W. N., & Halmawati. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2010-2018). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2373-2390.
- Darwis, E. R. (2015). Pengaruh Beanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Elektronika Universitas Negeri Padang*.
- Felix, O. (2012). Analysis of The Effectiveness of Capital Expenditure Budgeting In The Local Government System of Ondo State, Nigeria. *Journal of Accounting and Taxation*, 4(1), 1-6.
- Ghozali, I. (2013). *Multivariate analysis application with SPSS program*. Semarang: Diponegoro University Publishing Agency.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisa multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Unversitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi Dengan Eviews 10*. Semarang: Badan Penerbit-Undip.

- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53-64.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, T. U., & Erinos. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2018). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2348-2361.
- Harjito, Y., Surya, N. G., & Yulianto. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi FEB*. 5(1), 19-28.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Kasdy, L. M., Nadirsyah, & Fahlevi, H. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal dan Implikasinya Pada Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(1), 1-18.
- kominfo. (2020). *Inilah Perpres 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024*. Indonesia: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/26415/inilah-perpres-63-tahun-2020-tentang-penetapan-daerah-tertinggal-tahun-2020-2024/0/berita>.
- kominfo. (2020). *Inilah Perpres 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024*. Indonesia: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/26415/inilah-perpres-63-tahun-2020-tentang-penetapan-daerah-tertinggal-tahun-2020-2024/0/berita>.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. ANDI.
- Marizka, R. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Tahun 2006- 2011). *Jurnal Perspektif dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 2-22.

- Marselina, A., & Herianti, E. (2022). Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 2 (2), 110-118.
- Mbipi, D. S., Assih, P., & Sumtaky, M. (2020). Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Accounting and Financial Review*, 3(2), 152-158.
- Musfirati, A., & Sugiyanto, H. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, dan Keuangan*, 5(1), 20-36.
- Nindita, N. L., & Rahayu, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Serta Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. *Journal Accounting and Finance*, 2(1), 12-19.
- Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhasanah, & Maria. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 1(1), 60-73.
- Nurkhayati, E. D. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi*, 11(01), 1-14.
- Oktavia, C., & Handayani, N. (2021). Pengaruh PAD, Tax Effort, Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(3), 1-20.
- Pos, K. (2022). *26 Tahun Otonomi Daerah, Kemandirian Jadi PR*. Kalimantan Timur: Kaltim Pos.
- PP Nomor 55 Tahun 2005*. (t.thn.).
- Putri, E. D. (2015). Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah*.
- Putri, F. G., & Sjadili, E. H. (2013). Pengaruh dana perimbangan, belanja modal, dan pinjaman daerah terhadap tingkat kemandirian daerah: studi empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2006-2010. *Jurnal Program Studi Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, 1-19.

- Ristansi, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 2(2), 115-121.
- Riyadi, W. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi*, 3(1), 298-314.
- Sanga, K. P., Hermanto, S. B., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Penerimaan Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19 (2), 67-81.
- Saputra, M. G. (2022). *Daftar Daerah-Daerah Tertinggal di Indonesia dalam Stranas PPDT 2022-2024*. Indonesia: Merdeka.com.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual)*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, D. B., Rahayu, S., & Yudowati, S. P. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (studi Pada Kota/kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014). *e-Proceeding Management* (hal. 3308-3314). Bandung: December 2016.
- Suwandi, K. A., & Tahar, A. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta). *Jurnal InFestasi*, 118-136.
- Tama, A. I., & Pujihastuti, I. (2022). Determinan Kemandirian Keuangan Pada Pemda Tingkat II Di Provinsi Jawa Tengah. *EQUITY*, 24(2), 261-276.
- Utomo, L. P., Asyik, N. F., & Hermanto, S. B. (2017). Belanja Modal Memediasi Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Otonomi Khusus. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 12(2), 115-128.
- Verawaty, Fransisca, S., & Rahmawati, R. (2017). Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah MBiA*, 16(1), 1-10.

# LAMPIRAN

**Lampiran 1. Jadwal Penelitian**

**Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Jurnal Utama				■					■																			
2	Review Jurnal					■				■	■																		
3	Penyusunan Sinopsis												■																
4	Penyusunan Proposal													■	■	■	■												
5	Bimbingan					■	■	■										■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
6	Ujian Proposal																												
7	Revisi Proposal																												
8	Olah dan Analisis Data																						■						
9	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																							■					
10	Pendaftaran Munaqosah																								■				
11	Ujian Munaqosah																									■			
12	Revisi Setelah Munaqosah																										■	■	■

**Lampiran 2. Tabulasi Data**

<b>No</b>	<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>X1_PAD</b>	<b>X2_DBH</b>	<b>X3_DAU</b>	<b>X4_DAK</b>	<b>X5_BM</b>	<b>Y_TKKD</b>	<b>LnY_TKKD</b>
1	Kabupaten Teluk Wondama	0.1130	0.0240	0.5228	0.1514	0.2041	0.0413	-1.38
2	Kabupaten Teluk Bintuni	0.1270	0.1461	0.2787	0.0697	0.3117	0.0463	-1.33
3	Kabupaten Sorong Selatan	0.2309	0.0163	0.5111	0.1752	0.1548	0.0262	-1.58
4	Kabupaten Sorong	0.0594	0.1136	0.4356	0.1935	0.2179	0.0362	-1.44
5	Kabupaten Tambrauw	0.0217	0.0148	0.5210	0.1130	0.0970	0.0072	-2.14
6	Kabupaten Maybrat	0.4094	0.0152	0.4617	0.1142	0.2189	0.0097	-2.01
7	Kabupaten Manokwari Selatan	0.0932	0.0223	0.5746	0.1092	0.2118	0.0157	-1.80
8	Kabupaten Pegunungan Arfak	0.1434	0.0201	0.4735	0.1521	0.2185	0.0055	-2.26
9	Kabupaten Jayawijaya	0.1425	0.0252	0.4877	0.1696	0.1659	0.0488	-1.31
10	Kabupaten Nabire	0.1411	0.0344	0.5476	0.1900	0.0992	0.0763	-1.12
11	Kabupaten Paniai	0.1158	0.0299	0.4980	0.1979	0.1648	0.0162	-1.79
12	Kabupaten Puncak Jaya	0.0450	0.0265	0.5666	0.0994	0.0928	0.0146	-1.84
13	Kabupaten Boven Digoel	0.1423	0.0349	0.6292	0.0801	0.1462	0.0330	-1.48
14	Kabupaten Mappi	0.0862	0.0279	0.5683	0.1860	0.1937	0.0160	-1.80
15	Kabupaten Asmat	0.0520	0.0252	0.6005	0.1192	0.1271	0.0195	-1.71
16	Kabupaten Yahukimo	0.0753	0.0221	0.4702	0.1352	0.1183	0.0126	-1.90
17	Kabupaten Pegunungan Bintang	0.0334	0.0349	0.7336	0.1787	0.1757	0.0086	-2.06
18	Kabupaten Keerom	0.0917	0.0442	0.5753	0.1531	0.1097	0.0252	-1.60
19	Kabupaten Waropen	0.3270	0.0418	0.6476	0.1246	0.1325	0.0118	-1.93
20	Kabupaten Supiori	0.0981	0.0516	0.6724	0.1349	0.1745	0.0174	-1.76
21	Kabupaten Mamberamo Raya	0.1057	0.0363	0.7034	0.0981	0.0963	0.0050	-2.30

22	Kabupaten Nduga	0.0255	0.0326	0.5902	0.0865	0.1393	0.0063	-2.20
23	Kabupaten Lanny Jaya	0.0272	0.0250	0.4845	0.1032	0.1551	0.0075	-2.12
24	Kabupaten Mamberamo Tengah	0.1984	0.0352	0.6707	0.1085	0.2112	0.0107	-1.97
25	Kabupaten Yalimo	0.1451	0.0294	0.5406	0.0824	0.1530	0.0107	-1.97
26	Kabupaten Puncak	0.0870	0.0269	0.6184	0.0704	0.0791	0.0055	-2.26
27	Kabupaten Dogiyai	0.0946	0.0373	0.5357	0.1907	0.1856	0.0105	-1.98
28	Kabupaten Intan Jaya	0.2413	0.0317	0.6324	0.1645	0.2232	0.0239	-1.62
29	Kabupaten Deiyai	0.0682	0.0434	0.5730	0.1656	0.1739	0.0060	-2.22
30	Kabupaten Kepulauan Aru	0.0161	0.0141	0.8592	0.2304	0.1610	0.0280	-1.55
31	Kabupaten Seram Bagian Barat	0.0903	0.0103	0.6254	0.2726	0.2000	0.0404	-1.39
32	Kabupaten Seram Bagian Timur	0.1673	0.0311	0.5448	0.2172	0.2139	0.0297	-1.53
33	Kabupaten Maluku Barat Daya	0.0404	0.0126	0.5631	0.2641	0.2929	0.0414	-1.38
34	Kabupaten Buru Selatan	0.0717	0.0202	0.6359	0.2490	0.2693	0.0308	-1.51
35	Kabupaten Kepulauan Sula	0.0583	0.0467	0.6972	0.2245	0.1011	0.0243	-1.61
36	Kabupaten Pulau Taliabu	0.4634	0.0691	0.5365	0.2048	0.3554	0.0265	-1.58
37	Kabupaten Lombok Utara	0.0747	0.0241	0.4525	0.2228	0.1581	0.1024	-0.99
38	Kabupaten Sumba Barat	0.1036	0.0098	0.5444	0.2215	0.1736	0.0794	-1.10
39	Kabupaten Sumba Timur	0.1337	0.0085	0.5467	0.1678	0.1282	0.1137	-0.94
40	Kabupaten Kupang	0.1015	0.0075	0.5595	0.2123	0.1293	0.0640	-1.19
41	Kabupaten Timor Tengah Selatan	0.0597	0.0063	0.5319	0.1741	0.1095	0.0479	-1.32
42	Kabupaten Belu	0.0647	0.0095	0.5650	0.1893	0.1128	0.0845	-1.07
43	Kabupaten Alor	0.0869	0.0071	0.5582	0.2341	0.1811	0.0481	-1.32
44	Kabupaten Lembata	0.0381	0.0092	0.5752	0.1888	0.1592	0.0485	-1.31
45	Kabupaten Rote Ndao	0.0976	0.0092	0.5799	0.2134	0.1408	0.0422	-1.38



46	Kabupaten Sumba Tengah	0.0764	0.0112	0.6053	0.2044	0.1638	0.0489	-1.31
47	Kabupaten Sumba Barat Daya	0.0825	0.0073	0.4698	0.2179	0.1360	0.0437	-1.36
48	Kabupaten Manggarai Timur	0.0537	0.0063	0.4553	0.2431	0.2189	0.0400	-1.40
49	Kabupaten Sabu Raijua	0.0402	0.0108	0.5961	0.1793	0.2473	0.0485	-1.31
50	Kabupaten Malaka	0.1103	0.0075	0.5053	0.2389	0.1501	0.0641	-1.19
51	Kabupaten Donggala	0.0676	0.0257	0.6044	0.3050	0.2270	0.0400	-1.40
52	Kabupaten Tojo Una-una	0.0968	0.0269	0.5423	0.1832	0.1456	0.0657	-1.18
53	Kabupaten Sigi	0.1496	0.0212	0.4929	0.2251	0.1286	0.0649	-1.19
54	Kabupaten Nias	0.1871	0.0132	0.4768	0.1523	0.1233	0.1267	-0.90
55	Kabupaten Nias Selatan	0.0565	0.0101	0.4553	0.2072	0.1737	0.0234	-1.63
56	Kabupaten Nias Utara	0.0218	0.0166	0.5394	0.1923	0.1611	0.0271	-1.57
57	Kabupaten Nias Barat	0.1018	0.0187	0.5322	0.1819	0.1081	0.0286	-1.54
58	Kabupaten Kepulauan Mentawai	0.0567	0.0184	0.6832	0.1611	0.1985	0.0381	-1.42
59	Kabupaten Musi Rawas Utara	0.0770	0.1189	0.4099	0.1152	0.2444	0.0550	-1.26
60	Kabupaten Pesisir Barat	0.0464	0.0150	0.5240	0.1864	0.2535	0.0358	-1.45

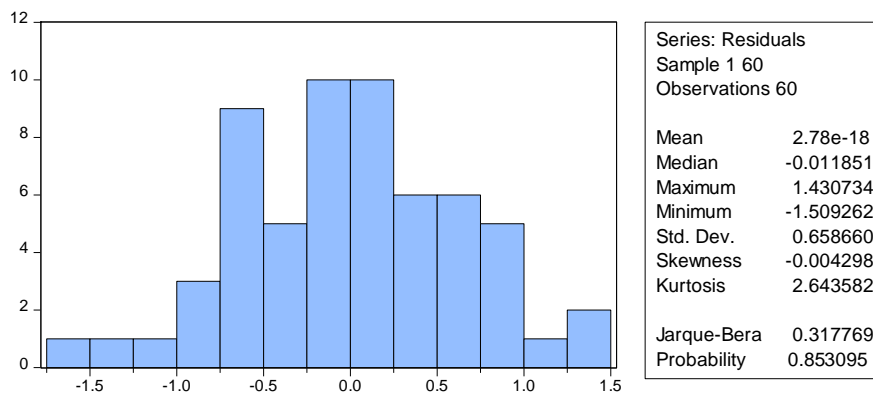
## Lampiran 3. Olah Data

### 1. Statistik Deskriptif

	Y_TKKD	X1_PAD	X2_DBH	X3_DAU	X4_DAK	X5_BM
Mean	0.036275	1.072318	0.028198	0.556542	0.173282	0.171965
Median	0.03025	0.8861	0.02315	0.54715	0.1806	0.16245
Maximum	0.1267	4.6343	0.1461	0.8592	0.305	0.3554
Minimum	0.005	0.1609	0.0063	0.2787	0.0697	0.0791
Std. Dev.	0.027146	0.845084	0.026277	0.088604	0.053923	0.056831
Skewness	1.274662	2.359262	2.798806	0.319896	0.079216	0.860329
Kurtosis	4.638681	9.429286	11.57035	5.146267	2.471124	3.788767
Jarque-Bera	22.96083	159.0004	261.9606	12.53949	0.762026	8.957052
Probability	0.00001	0	0	0.001893	0.683169	0.01135
Sum	2.1765	64.3391	1.6919	33.3925	10.3969	10.3179
Sum Sq. Dev.	0.043478	42.13586	0.040739	0.463185	0.171551	0.190559
Observations	60	60	60	60	60	60

### 2. ASUMSI KLASIK

#### Normalitas



#### Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	1.215213	Prob. F(5,54)	0.3146
Obs*R-squared	6.068372	Prob. Chi-Square(5)	0.2996
Scaled explained SS	5.081313	Prob. Chi-Square(5)	0.4060

Test Equation:  
 Dependent Variable: ARESID  
 Method: Least Squares  
 Date: 10/27/22 Time: 01:40  
 Sample: 1 60  
 Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.397558	0.422984	3.304044	0.0017
X1_PAD	-0.047525	0.062440	-0.761128	0.4499
X2_DBH	-1.283357	2.360464	-0.543689	0.5889
X3_DAU	-0.771119	0.590171	-1.306603	0.1969
X4_DAK	-1.981223	1.091607	-1.814959	0.0751
X5_BM	-0.038075	1.076420	-0.035372	0.9719
R-squared	0.101140	Mean dependent var		0.531390
Adjusted R-squared	0.017912	S.D. dependent var		0.382977
S.E. of regression	0.379531	Akaike info criterion		0.994880
Sum squared resid	7.778377	Schwarz criterion		1.204315
Log likelihood	-23.84641	Hannan-Quinn criter.		1.076802
F-statistic	1.215213	Durbin-Watson stat		2.411590
Prob(F-statistic)	0.314605			

### Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors  
 Date: 10/27/22 Time: 01:41  
 Sample: 1 60  
 Included observations: 60

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.588753	74.52532	NA
X1_PAD	0.012830	3.007857	1.140476
X2_DBH	18.33495	3.421276	1.575846
X3_DAU	1.146149	46.05732	1.119992
X4_DAK	3.921191	16.32286	1.419159
X5_BM	3.812842	15.80534	1.532845

### 3. Kelayakan Model

Dependent Variable: LOG(Y\_TKKD)  
 Method: Least Squares  
 Date: 10/27/22 Time: 01:47  
 Sample: 1 60  
 Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.439459	0.767302	-4.482534	0.0000

X1_PAD	0.033410	0.113268	0.294964	0.7692
X2_DBH	2.488138	4.281934	0.581078	0.5636
X3_DAU	-2.782700	1.070583	-2.599237	0.0120
X4_DAK	9.469799	1.980200	4.782244	0.0000
X5_BM	-2.173648	1.952650	-1.113179	0.2706
<hr/>				
R-squared	0.372054	Mean dependent var	-3.615009	
Adjusted R-squared	0.313911	S.D. dependent var	0.831189	
S.E. of regression	0.688478	Akaike info criterion	2.185973	
Sum squared resid	25.59612	Schwarz criterion	2.395408	
Log likelihood	-59.57920	Hannan-Quinn criter.	2.267895	
F-statistic	6.398937	Durbin-Watson stat	1.818901	
Prob(F-statistic)	0.000098			

## Uji F

Dapat dilihat dari tabel Regresi Nilai Prob(F-Statistic) 0.000098 (lebih kecil dari 0.05) yang artinya X berpengaruh

## Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Dapat dilihat dari tabel Regresi Nilai Adjusted R-Squared nya 0.313911, yang berarti X mampu mempengaruhi Y dengan presentase sebesar 31.4%

## A. KELAYAKAN MODEL

### Uji Hipotesis

Dependent Variable: LOG(Y\_TKKD)

Method: Least Squares

Date: 10/27/22 Time: 01:47

Sample: 1 60

Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.439459	0.767302	-4.482534	0.0000
X1_PAD	0.033410	0.113268	0.294964	0.7692
X2_DBH	2.488138	4.281934	0.581078	0.5636
X3_DAU	-2.782700	1.070583	-2.599237	0.0120
X4_DAK	9.469799	1.980200	4.782244	0.0000
X5_BM	-2.173648	1.952650	-1.113179	0.2706
<hr/>				
R-squared	0.372054	Mean dependent var	-3.615009	
Adjusted R-squared	0.313911	S.D. dependent var	0.831189	
S.E. of regression	0.688478	Akaike info criterion	2.185973	
Sum squared resid	25.59612	Schwarz criterion	2.395408	
Log likelihood	-59.57920	Hannan-Quinn criter.	2.267895	
F-statistic	6.398937	Durbin-Watson stat	1.818901	
Prob(F-statistic)	0.000098			

## Lampiran 4. Plagiasi

Skripsi Azka Barizati Almas

---

ORIGINALITY REPORT

---

**23**%  
SIMILARITY INDEX

**22**%  
INTERNET SOURCES

**14**%  
PUBLICATIONS

**9**%  
STUDENT PAPERS

---

PRIMARY SOURCES

---

## **Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **Data Pribadi**

Nama Lengkap : Azka Barizati Almas  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat dan Tanggal Lahir : Sukoharjo, 22 Juni 1998  
No. Telp : 082323774230  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
E-mail : [azka199838@gmail.com](mailto:azka199838@gmail.com)

#### **Pendidikan Formal**

1. MI Muhammadiyah Gonilan Tahun 2004-2010
2. MTs Muhammadiyah Imam Syuhodo Tahun 2010-2013
3. SMA ABBS (*Al-Abidin Bilingual Boarding School*) Surakarta Tahun 2013-2016
4. UIN Raden Said Surakarta Tahun 2016-2022